

OPTIMALISASI PELAYANAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMBANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

OPTIMIZATION OF ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICES (LPSE) IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES FOR DEVELOPMENT IN KOTA PARIAMAN

Tesha Dwi Putri¹, Fauzan², Yondrizal³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,

tesha.dwiputri@gmail.com,

Fakultas Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, fauzanmika86@gmail.com

ABSTRAK: Kehadiran LPSE semestinya mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena proses pengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkait transparansi dan efisiensi penggunaan *e-procurement*. Disamping itu, pemanfaatan *e-procurement* oleh masyarakat juga dirasa belum memaksimal karena ada “kecanggungan” ketika masyarakat berhadapan dengan mekanisme baru yang sarat teknologi. Padahal di tengah pandemi yang berlangsung, semestinya penggunaan layanan publik yang berbasis digital menjadi prioritas di masyarakat. Untuk memaksimalkan kinerja LPSE, maka perlu dirumuskan strategi atau optimalisasi *e-procurement* terkait pelayanan LPSE khususnya Kota Pariaman. Hal ini dirasa penting mengingat LPSE Kota Pariaman sempat meraih penghargaan National Procurement Award tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian dan hasil observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan dokumentasi. Informan penelitian didapatkan dengan menggunakan teknik *purposive*. Fokus data penelitian ini yaitu memetakan aspek internal dan eksternal yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam pengoptimalan pelayanan LPSE. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan keknik deskriptif analitik. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kota Pariaman dapat dilakukan melalui; 1) Sumber Daya Manusia (SDM) dimana dibutuhkan analisis jabatan serta analisis beban kerja untuk memetakan kebutuhan SDM pengadaan di LPSE. SDM pengadaan harus memiliki kompetensi mulai dari lingkup pengetahuan, ketrampilan begitu juga dengan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan, 2) proses pengadaan, dimana pengoptimalan fungsi LPSE dapat terintegrasi khususnya selama proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Proses pengadaan memiliki potensi resiko yang mungkin terjadi, 3) Sistem Informasi dalam hal ini adalah yang telah terhubung dengan sistem lainnya. Hal ini guna memudahkan layanan pengadaan agar lebih cepat dan gampang bagi pengguna, 4) Independen dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), fokus independensi disini adalah mengurangi proses-proses yang dilakukan secara konvensional sehingga akan terbebas dari praktik KKN.

Kata Kunci: Strategi, efektivitas, efisiensi, *e-government*, *e-procurement*.

ABSTRACT: The presence of LPSE should be able to bring benefits to its users because the procurement process has been standardized, but what has happened is that problems arise regarding transparency and efficiency in the use of *e-procurement*. In addition, the use of *e-procurement* by the community is also felt to have not been maximized because there is "clumsiness" when people are faced with new mechanisms that are full of technology. Even though in the midst of the ongoing pandemic, the use of digital-based public services should be a priority

in the community. To maximize LPSE performance, it is necessary to formulate a strategy or optimization of e-procurement related to LPSE services, especially Kota Pariaman. This is considered important considering that LPSE Kota Pariaman had won the National Procurement Award in 2018. Answering this goal, the researchers tried to conduct research using qualitative research methods. The type of research used is case study research. The data used in this study are primary data obtained from in-depth interviews with research informants and observations. While the secondary data obtained by using the technique of documentation. Research informants were obtained by using purposive technique. The focus of this research data are; mapping internal and external aspects that can be used to formulate strategies in optimizing LPSE services. The analysis technique in this research is qualitative data analysis which is presented with analytical descriptive technique. Based on the findings in the field, the authors conclude that the optimization of the procurement of goods and services at the LPSE's Pariaman City can be done through; 1) Human Resources (HR) where job analysis and workload analysis are needed to map procurement HR needs at LPSE. Procurement HR must have competencies ranging from the scope of knowledge, skills as well as work attitudes in accordance with the standards set, 2) the procurement process, where optimization of LPSE functions can be integrated, especially during the procurement planning process up to the execution of the contract. The procurement process has potential risks that may occur, 3) Information systems in this case are those that have been connected to other systems. This is to facilitate the procurement service to be faster and easier for users, 4) Independent and free of Corruption, Collusion, Nepotism (KKN), the focus of independence here is to reduce conventional processes so that they will be free from the practice of KKN.

Keywords: Strategy, effectiveness, efficiency, e-government, e-procurement.

A. PENDAHULUAN

Di era global seperti saat ini, semestinya pemerintah daerah mampu membangun kemudahan dan percepatan pengadaan yang adaptif terhadap teknologi-teknologi baru yang kontributif dalam mewujudkan pelayanan prima. Birokrasi publik perlu melakukan orientasi dari *rowing government* (pemerintah yang serba mengurus) menuju *steering government* (pemerintah yang hanya mengarahkan) untuk mendapatkan efektivitas pemerintahan. Indonesia sendiri, untuk beberapa daerah menunjukkan kinerja pengembangan *e-government* yang lemah, tidak terkecuali inovasi yang sama juga dihadirkan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Bersamaan dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Seperti diketahui, transformasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan berbasis *e-government* ini telah dimulai pada aparaturnya penyelenggara pemerintahan di beberapa daerah. Beberapa daerah telah berinovasi dengan membentuk unit pelayanan terpadu yang mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pada saat ini, institusi pemerintahan dari berbagai sektor dan bagian daerah berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam menawarkan pelayanan bagi masyarakatnya, khususnya pelayanan secara lebih transparan dan terbuka. Begitu pula halnya dengan LPSE di Provinsi Sumatera Barat. Dari 644 LPSE di seluruh Indonesia, hanya 17 LPSE Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan. Dan salah satunya LPSE Kota Pariaman. Kota Priaman dinilai sebagai Kota yang memiliki prasarana lelang (LPSE) yang lebih baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya penghargaan National Procurement Award 2018 kategori: Komitmen Penerapan Standar LPSE: berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi *e-procurement*.

Sistem *e-procurement* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standar proses pengadaan, terwujudnya optimalisasi pengadaan barang dan jasa yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, masyarakat selaku pengguna sering mengalami kendala karena dinilai belum transparan dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi penunjang agar penggunaan *e-procurement* pada LPSE dapat dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan pemakaian *e-*

procurement dibutuhkan strategi berupa kebijakan program dan alokasi sumber daya agar pelayanan LPSE Kota Pariaman lebih maksimal.

Secara umum, penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi *e-government* di Kota Pariaman yang sudah berjalan hampir dua dasawarsa. Namun dari perkembangannya, *e-government* mengalami stagnasi di berbagai daerah. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan karena efeknya adalah penyelenggaraan pemerintah yang akan mengalami pergeseran dari model tradisional kepada model digital terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Secara khusus tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi LPSE terhadap penggunaan *e-procurement* di Kota Pariaman. Oleh karena itu tujuan khusus dari penelitian ini adalah merumuskan strategi untuk optimalisasi pelayanan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Pariaman. Urgensi penelitian ini dilakukan karena belum ada hasil kajian yang menjelaskan tentang bagaimana optimalisasi LPSE dalam memberikan pelayanan barang dan jasa. Optimalisasi yang dihasilkan akan membantu memaksimalkan peran pelaku layanan LPSE untuk membantu tercapainya efisiensi dan efektifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa di Kota Pariaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor LPSE Kota Pariaman. Pemilihan tempat penelitian dilakukan dengan teknik *purposive* yaitu, pemilihan tempat penelitian dengan sengaja melalui pertimbangan kantor ini sebagai basis pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan elektronik. Adapun metoda penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif. Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh data dengan cara mendalami fenomena sesuai dengan permasalahan peneliti.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Terdapat dua jenis data yang digunakan sebagai bahan untuk analisa data, yaitu; data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 1) Wawancara mendalam (*in depth interview*). Disini peneliti mengarahkan pertanyaan terkait dengan data yang diinginkan. Wawancara nantinya akan diarahkan kepada Admin PPE LPSE Pariaman, Staf LPSE Pariaman, Staf Ekonomi Pembangunan Pariaman, kemudian 3 orang pengguna layanan pengadaan secara elektronik sebagai informan pembanding. Kemudian Teknik pengumpulan data kedua adalah Dokumentasi, dalam hal ini, peneliti melakukan studi dokumentasi setiap kali melakukan wawancara dengan informan, begitu juga dokumentasi atas observasi sarana prasarana terkait layanan pengadaan secara elektronik di Pariaman. Ketiga, Pengamatan (*observasi*) berupa pengamatan langsung di kantor LPSE Kota Pariaman. Melalui pengamatan ini, dapat dikumpulkan data yang relevan, terutama menguatkan data hasil wawancara dengan informan sebelumnya.

Fokus data penelitian ini terdiri dari; memetakan aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam pengoptimalan pelayanan LPSE. Selain itu, fokus data penelitian ini menggambarkan kondisi pelayanan LPSE yang terjadi saat ini. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan Teknik deskriptif analitik. Metode kualitatif ini bertujuan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan gejala sosial politik yang diamati seperti motif dan tindakan individu atau kelompok dalam realitas sosial politik yang terjadi, khususnya di lokasi yang peneliti pilih. Keseluruhan penelitian tergambar dalam peta jalan penelitian seperti gambar di bawah ini.

Gambar 1. Road Map Penelitian



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi inti (*Core Strategy*) LPSE Kota Pariaman

Di tengah tantangan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan melanda seluruh penjuru dunia, LPSE dibawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus bekerja dan berupaya untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) LKPP Tahun 2020-2024. Lebih lanjut LKPP terus berupaya untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dalam mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama Renstra LKPP tahun 2020-2024. Tercatat bahwa upaya-upaya LKPP yang dilakukan telah menghasilkan capaian kinerja yang melebihi target. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020 yang disusun sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja LKPP. Selain itu Laporan Kinerja LKPP Tahun 2020 merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Renstra LKPP tahun 2020-2024.

Dalam rangka mengemban amanat dan tugas pembentukan lembaga, LPSE dibawah LKPP menetapkan visi periode 2015-2019 yaitu “Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *Value for Money* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Sedangkan misi-misi yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi yaitu:

a. Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNE 2020 DAN 2019

Usuran Pemerintahan : 4	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4.01	Administrasi Pemerintahan			
Unit Organisasi : 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH			
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.05	BAGIAN ORGANISASI & APARATUR			

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	484.559.100,00	63.162.672,00	13,04	158.601.250,00
5.1	BELANJA OPERASI	484.559.100,00	63.162.672,00	13,04	134.010.750,00
5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	41.600.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	484.559.100,00	63.162.672,00	13,04	92.410.750,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	24.590.500,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	24.590.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(484.559.100,00)	(63.162.672,00)	13,04	(158.601.250,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(484.559.100,00)	(63.162.672,00)	13,04	(158.601.250,00)

PARIAMAN, 15 July 2020
Pengguna Anggaran

FADLI, SH, M. Hum
NIP. 19621211 198903 1 007

kan pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan *value for money* LPSE Kota Pariaman melalui tugas dan fungsinya pada Tahun 2020 telah berhasil mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran belanja pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sebesar 13,04 persen atau senilai Rp.63.162.670,00 dapat direalisasikan ditahun 2020 dari total anggaran Rp.484.559.100,00. Namun, dibanding tahun lalu di 2019, anggaran belanja barang dan jasa mangalami penurunan dari Rp. 92.410.750,00. diperoleh dengan membandingkan antara Pagu dengan hasil lelang;

Tidak hanya efisiensi diukur dari penggunaan anggaran belanja, juga dapat diukur dari sisi lamanya waktu proses pemilihan. Pada Tahun 2018 efisiensi waktu proses pra-kualifikasi berlangsung rata-rata selama 43 hari, sebagaimana tabel di bawah (Data LKPP Tahun 2018).

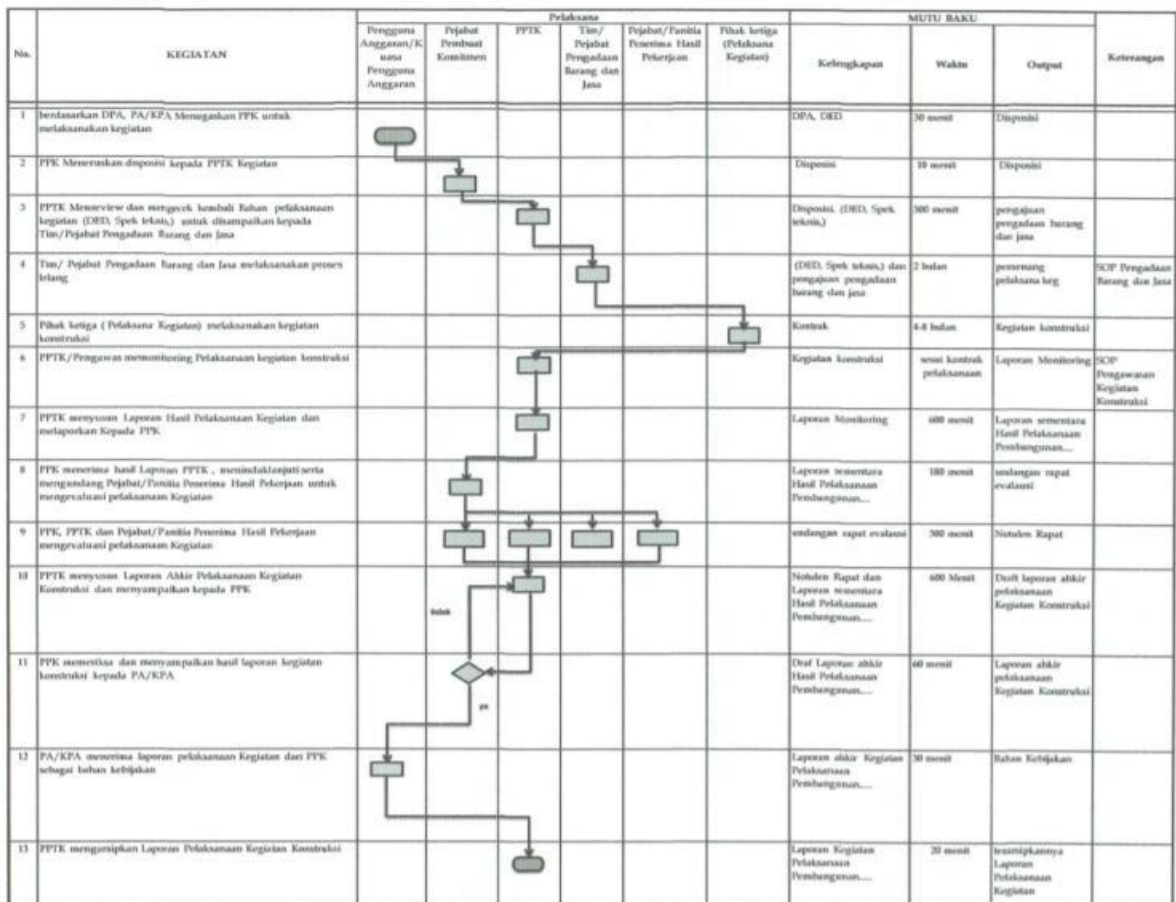
Tabel 3.7 Rata-Rata Waktu (Hari) Pemilihan Tahun 2018

WAKTU PEMILIHAN	JENIS PENGADAAN	RATA-RATA LAMA PEMILIHAN			RATA-RATA WAKTU PEMILIHAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pra Kualifikasi	Barang	46.9 Hari	36.2 Hari	53.61 Hari	43 Hari	40 Hari	43 Hari
	Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	41.7 Hari	41.4 Hari	42.17 Hari			
	Jasa Konsultansi (Perseorangan)	23.7 Hari	33 Hari	35.5 Hari			
	Pekerjaan Konstruksi	65.2 Hari	56.7 Hari	82.13 Hari			
	Jasa Lainnya	40.8 Hari	34.8 Hari	41.30 Hari			

Proses pemilihan pasca kualifikasi rata-rata berlangsung selama 20 hari (Data LKPP Tahun 2018).

WAKTU PEMILIHAN	JENIS PENGADAAN	RATA-RATA LAMA PEMILIHAN			RATA-RATA WAKTU PEMILIHAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pasca Kualifikasi	Barang	17 Hari	16.9 Hari	17.90 Hari	18 Hari	18 Hari	20 Hari
	Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	18.2 Hari	16.9 Hari	18.29 Hari			
	Jasa Konsultansi (Perseorangan)	19.0 Hari	18.7 Hari	16.58 Hari			
	Pekerjaan Konstruksi	21.8 Hari	21.4 Hari	22.03 Hari			
	Jasa Lainnya	15.9 Hari	17.5 Hari	16.23 Hari			

Artinya, telah terjadi penghematan efisiensi waktu mulai dari pra-kualifikasi sampai dengan pasca kualifikasi setiap tahunnya. Namun ketika dikonfirmasi kepada pengguna (user), masih banyak yang mengeluh akan proses yang dapat terbilang terlalu lama. Berdasarkan wawancara Bapak Taufik, bahwa waktu 20 hari dirasa terlalu lama, karena bagi peserta tender perubahan harga tidak dapat dipastikan. Minggu ini dengan minggu yang akan datang biasanya akan memberikan dampak perubahan harga barang. Hal ini juga ditekankan sebagaimana SOP pelaksanaan lelang dan konstruksi Dinas PU, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman di bawah, bahwa proses yang dibutuhkan menghabiskan waktu 2 bulan.



Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing

Dalam hal pengukuran tingkat penggunaan produk dalam negeri yang ada di e-katalog belum dilakukan oleh LPSE Kota Pariaman, karena masih diperlukannya koordinasi lebih lanjut dengan pihak eksternal seperti antara lain Dinas Perdagangan dan UMKM. Dalam hal ini, peneliti mencoba melakukan verifikasi data atas penggunaan e-katalog pada lelang elektronik dengan menggunakan capaian kinerja indikatornya adalah tingkat partisipasi penyedia yang ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dalam pengadaan barang/jasa LPSE Kota Pariaman. Ketika peneliti membuka aplikasi SIKaP, tidak ditemukan data yang dibutuhkan, bahkan ada pemberitahuan sedang *maintenance* (sebagaimana gambar di bawah).

Disamping itu, Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan pasar ternyata membawa dampak terhadap penggunaan *e-procurement*. Kelemahan dari sistem ini adalah justru ketika pedagang kecil dibuat terintimidasi oleh pedagang besar dalam meraih persaingan pasar. Pasalnya, dominasi pedagang-pedagang besar membuat pedagang kecil kesulitan menembus pasar. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Romi (Panitia ULP Kota Pariaman) “Masalah yang timbul justru ketika munculnya *e-catalogue* karena kalau kita lihat portal, justru pedagang-pedagang besar yang mendominasi, seperti contoh untuk pengadaan gadget dan alat elektronik dipegang “bhineka” (nama toko), efeknya justru memperkecil peluang pedagang kecil soal persaingan harga”.



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B. Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 7556/D.2.3/08/2020

05 Agustus 2020

Hal : Pengumuman Maintenance Aplikasi SIKaP LKPP

Yth. Pengelola LPSE / Pengguna SPSE

Dengan ini kami informasikan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB s.d. Minggu, 9 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB, akan dilakukan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan berdampak pada tidak dapat diaksesnya Aplikasi SIKaP (<https://sikap.lkpp.go.id>) selama kegiatan pemeliharaan tersebut berlangsung.

Demikian informasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi

2. Strategi konsekuensi (*Consequency Strategy*)

Strategi konsekuensi yaitu fokus pada kinerja pegawai. Dimana hasil akan menentukan insentif pegawai. Aparatur sipil akan berorientasi pada hasil kerja yang menentukan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing aparatur sipil. Indikator capaian kerja akan menjadi tolak ukur hasil kerja aparat, yang mana semakin tinggi nilai KPI maka akan semakin memuaskan pelayanan lembaga pemerintah khususnya LPSE Pariaman. Sejalan dengan strategi peningkatan kinerja pegawai di Kota Pariaman, hal ini tertuang dalam visi misi Kota Pariaman dimana salah satu tujuan jangka menengah BKPSDM Kota Pariaman 2018-2023 sebagai berikut;

Meningkatnya pengelolaan penempatan aparatur sesuai kompetensi indikator sasaran, yakni persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi

Meningkatnya disiplin pegawai dimana indikator sasaran berupa persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai

Meningkatnya kapasitas ASN yang memenuhi standar kompetensi yang mana indikator sasarannya berupa standar kompetensi manajerial dan kompetensi teknis

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kepegawaian yang mana indikator sasaran berupa indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan 4 tujuan jangka menengah BKPSDM Kota Pariaman, kemudian dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN Kota Pariaman berdasarkan tabel di bawah ini.

**Tabel
1**

		kompetensi teknis			
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	77 (Baik)	79,98 (Baik)	104%

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target BKPSDM Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pengelolaan penempatan aparatur sesuai kompetensi	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	60%	46%	77%
2.	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase peningkatan disiplin pegawai	75%	99,99%	132%
3.	Meningkatnya kapasitas ASN yang memenuhi standar kompetensi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi manajerial	30%	39%	130%
		Persentase ASN yang memenuhi standar	35%	0%	0%

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa capaian realisasi kinerja ASN Kota Pariaman kisaran angka 77-132% yang artinya telah memenuhi standar kepuasan. Kemudian membandingkan dengan capaian kinerja ASN pada LPSE Kota Pariaman, menurut staf Ekbang Kota Pariaman tidak jauh beda dikisaran 82-100%. Ditegaskan bahwa ASN LPSE Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami peningkatan kompetensi baik dari manajerial maupun kompetensi teknis. Hal ini didukung dengan pelatihan dan evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Bahkan jika *performance* ASN menurun lebih dari 3 tahun akan diberikan teguran oleh atasan. Begitupun dengan kepuasan pelayanan, dalam hal ini LPSE menerima kotak saran atas pelayanan yang diberikan baik langsung maupun online. Sementara untuk penempatan aparatur sesuai kompetensi untuk tahun ini sudah mulai ditingkatkan, khususnya aparatur yang sesuai dengan kompetensi. Seleksi awal ASN difokuskan agar ASN yang diterima sesuai bidangnya.

3. Strategi pelanggan (*Customer Strategy*)

Strategi pelanggan merupakan bagian fundamental yang memusatkan pada akuntabilitas, pertanggung-jawaban lembaga. Strategi pelanggan akan memecah pola lama dengan menggeser sebagian tanggungjawab kepada pelanggan. Penciptaan pertanggungjawaban kepada pelanggan sebagai pihak ketiga semakin menekan lembaga pemerintah untuk memperbaiki hasil kerja mereka, tidak sekedar mengelola sumber daya mereka saja untuk mengurangi kecurangan. Dalam hal ini, aparat birokrasi melakukan reorientasi dari kepentingan kelembagaannya kepada kepentingan pemenuhan kebutuhan berdasarkan kepentingan masyarakat (user), peningkatan kualitas layanan, serta kompetensi pasar yang sehat.

Berdasarkan wawancara dengan pengguna aplikasi tender elektronik pada pengadaan barang dan jasa di LPSE Kota Pariaman, diketahui bahwa rata-rata informan menjawab bahwa proses lelang memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Proses lelang yang dinilai cukup lama
2. Jumlah Pengadaan yang Diumumkan.

Dalam mengungkapkan jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik LPSE telah menyediakan informasi di portal LPSE. Adapun bagi penyedia yang telah terdaftar dalam sistem LPSE. Maka pengumuman pengadaan akan otomatis disampaikan kepada email masing-masing user yang sudah mendaftar dan melakukan verifikasi. Selain menjelaskan pengumuman tentang pengadaan, portal LPSE juga memberi kemudahan bagi pengguna yang belum login untuk mendapatkan berita dan informasi mengenai update lelang di lingkungan Kota Pariaman.

3. Masih ditemukan cara-cara konvensional. E-procurement memberikan kesempatan kepada penyedia barang untuk ikut berkompetisi.

Menurut Admin PPE LPSE Pariaman, "Syaratnya untuk dapat ikut adalah harus teregister di kolom "pendaftaran penyedia" dulu, nanti ada pilihan unduh formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan setelah itu nanti berkas diberikan langsung ke panitia untuk diverifikasi".

Plus-minus ketika akan ikut serta adalah bahwa verifikasi dokumen tetap dilakukan langsung atau secara konvensional. Hal ini dirasa penting bahwa pengecekan fisik atas keaslian masih belum mampu didukung secara elektronik. Disamping itu, jika tidak di-cek secara langsung, akan banyak hal yang luput atau dimanipulasi.

4. Strategi pengendalian (*Control Strategy*)

Strategi Pengendalian disini yakni adanya perumusan kembali dalam upaya pengendalian organisasi, mulai dari pengendalian strategi, pengendalian manajemen,

kemudian pengendalian tugas. Ketiga hal ini dikembangkan dalam struktur organisasi yang bertumpu pada kekuatan aparatur Mutu. LPSE Kota Pariaman musti memiliki standar operasional sebagai acuan kerja yang telah disepakati dan dipatuhi baik oleh aparatur ataupun pengguna. Penguatan Peraturan dalam hal ini, perundang-undangan serta kegiatan penyalarsan peraturan perundang-undangan terus dilakukan, antara lain:

- a. Identifikasi, analisis dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron;
- b. Sinkronisasi beberapa kebijakan;
- c. Pembuatan SOP sebagai bentuk Sistem pengendalian penyusunan perundang-undangan dan pelaksanaannya telah dievaluasi sekali dalam setahun.

Salah satu bentuk pengendalian LPSE Kota Pariaman tercantum dalam produk hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Sebagaimana pada laman LPSE Pariaman, terdapat beberapa produk hukum dan aturan terkait proses pengadaan. Hanya saja untuk SOP belum semua peneliti temukan.

JDIIH LKPP
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Beranda Daftar Produk Hukum Tentang Kami Kontak Kami

Produk Hukum Terbaru

- Keputusan Deputi II Nomor 45 Tahun 2021**
Tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kepolisian Negara Republik Indonesia
Senin, 27 September 2021
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2021**
Tentang Pengawas Ujian Sertifikasi Dasar
Selasa, 07 September 2021
- Keputusan Deputi II Nomor 44 Tahun 2021**
Tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Selasa, 21 September 2021
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 174 Tahun 2021**
Tentang Penerima Sertifikat Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan sebagai Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa
Selasa, 07 September 2021
- Keputusan Sekretaris Utama Nomor 39 Tahun 2021**
Tentang Sekretariat Tim Penilai Instansi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Rabu, 15 September 2021
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 175 Tahun 2021**
Tentang Tim Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Selasa, 07 September 2021
- Keputusan Sekretaris Utama Nomor 38 Tahun 2021**
Rabu, 15 September 2021
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 171 Tahun 2021**
Tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Senin, 06 September 2021

5. Strategi budaya (*Culture Strategy*)

Strategi budaya yang mana budaya organisasi pemerintah yang dimaksud seperti nilai-nilai, norma, sikap, dan harapan pegawai. Seringkali budaya akan berubah lambat dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Menggunakan tiga pendekatan, yakni: membentuk kebiasaan, perasaan, dan pikiran organisasi kedalam sesuatu yang baru.

- Strategi budaya aparatur LPSE Kota Pariaman merupakan cerminan budaya kerja BKPSDM Kota Pariaman. Terdapat 2 budaya kerja ditubuh aparatur Kota pariaman, yakni;
1. Profesionalisme Aparatur, disini aparatur dituntut untuk mampu mengemban tugas-tugas yang diberikan. Tugas tersebut terkait dengan pemerintahan, pembangunan serta

kemasyarakatan, sehingga akan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Prima dalam Pelayanan, dalam hal ini, pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna jasa harus yang terbaik. Prima disini diukur standar operasional pelayanan yang sistematis dan terukur dengan jelas dan tegas.

Budaya kerja yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna atau pengunjung memang harus dibiasakan dan memerlukan sosialisasi terus menerus. Apalagi dimasa pandemi seperti saat ini semua beralih kepada pelayanan secara digital. Hal ini tentunya akan mengurasi interaksi langsung antara aparatur dengan pengguna. Kebanyakan permasalahan yang sering terjadi adalah adanya *missing* komunikasi antara pengguna dengan aparatur. Sehingga akibatnya proses terlambat dan pelayanan dianggap kurang. Misalkan permasalahan jaringan, atau sedang ada *maintenance* (pemeliharaan) website, maka LPSE 2 atau 3 hari sebelum melakukan pemeliharaan website akan mengumumkan dahulu via website. Kemudian untuk pengguna yang kurang puas dengan pelayanan atau ingin informasi lebih dalam dapat menghubungi kontak person yang tertera di website, disamping datang langsung ke kantor LPSE Pariaman.

Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan barang dan jasa

1. Melalui Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal ini, diperlukan alat ukur untuk menganalisa jabatan serta beban kerja untuk memetakan kebutuhan SDM pengadaan di LPSE Kota Pariaman. Hal ini bertujuan agar pengadaan kedepannya memiliki kompetensi mulai dari aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkannya, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, pelatihan, pelatihan, maupun mentoring agar pengembangan karyawan dapat maksimal.

Status kepegawaian dipastikan permanen pegawai LPSE, sedangkan pegawai yang statusnya masih unit organisasi yang lain, dapat segera dimutasikan menjadi pegawai LPSE. Hal ini memudahkan unit kerja LPSE dalam mengembangkan SDM serta menjadikan independensi unit kerja lebih optimal. Integritas SDM pengadaan wajib memenuhi level kompetensi yang ditetapkan.

2. Proses Pengadaan

Pengoptimalan fungsi LPSE khususnya terkait proses pengadaan barang/jasa harus terintegrasi dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. LPSE secara aktif menciptakan kondisi dan keadaan agar mampu ikut serta dan terlibat dalam proses perencanaan, sehingga mampu memberi nilai tambah kualitas perencanaan, memberikan konsultasi mitigasi resiko agar perencanaan lebih optimal dan dapat dimanfaatkan dengan baik. LPSE membangun kolaborasi dengan unit kerja pengelola layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yaitu Pusat Data dan Informasi sehingga kegiatan pengadaan barang/jasa berjalan efektif. LPSE perlu melengkapi tata kerja dengan standar operasional (SOP), mulai dari aturan dalam Pendampingan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, kemudian pembentukan Pokja Pemilihan, Review Dokumen Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Review Dokumen Pemilihan, Pemilihan Penyedia, serta Penetapan Penyedia LPSE harus memiliki target kinerja yang terukur dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga setiap menyelesaikan tugasnya dilakukan pengukuran kinerja.

Area kinerja meliputi ketepatan waktu pengadaan, penghematan biaya pengadaan, kualitas pengadaan serta tingkat layanan pengadaan. Kemudian indikator kinerja berupa capaian efisiensi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), capaian efisiensi pagu/nilai, kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa, partisipasi penyedia barang dan jasa, persentase penyedia yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, persyaratan penyedia/distributor, kepuasan

pengguna. Proses pengadaan barang dan jasa memiliki potensi resiko yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, resiko tidak ada calon penyedia yang memasukkan penawaran, atau semua penawaran diatas HPS. Resiko penyedia terpilih tidak mampu melaksanakan kontrak sesuai perjanjian. Untuk itu LPSE Kota Pariaman perlu menyusun peta potensi resiko dan dampak resiko, sehingga menjadi bahan kajian serta strategi untuk memitigasi resiko.

3. Sistem Informasi

Disamping sistem informasi yang sudah ada seperti *e-procurement*, sirup, *e-monitoring*, dan lain LPSE perlu mengintegrasikan sistem tersebut dengan sistem lainnya sesuai kebutuhan, sejak perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa. Disamping itu, perlu memaksimalkan penggunaan e-catalog yang mana koordinasi dengan UMKM harus terintegrasi. Upaya yang dilakukan LPSE dengan Dinas UMKM harus sejalan agar potensi distributor lokal dapat digali secara merata. Sehingga tidak ada ketimpangan akibat penggunaan jasa atau barang dari distributor besar saja.

4. Independen dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Terbentuknya LPSE bertujuan agar posisi pengadaan barang dan jasa terpisah dari unit organisasi penanggung jawab anggaran/kegiatan. Sudah semestinya unit kerja dan SDM yang ada didalamnya bersikap independen serta proses kerja yang kredibel dan bebas dari KKN. Semestinya tidak ada lagi proses konvensional yang dilakukan agar pelaksanaan e-government terwujud khususnya dalam area pelayanan publik. Kegiatan yang masih konvensional, atau masih banyak melakukan tatap muka antara pengguna dengan panitia pengadaan atau pihak pelaksana pengadaan tentunya akan menjadi bias. Tujuan pelayanan yang dilakukan secara elektronik salah satunya agar terbentuk transparansi dalam semua proses pengadaan. Ketika masih dilakukan secara manual, tentu akan mengurangi esensi atau nilai dari layanan secara elektronik. Oleh karenanya, pemaksimalan pelaksanaan pelayanan pengadaan secara elektronik harus maksimal. Terutama secara teknis, pemeliharaan alat dan sosialisasi penggunaan aplikasi harus diinformasikan secara terbuka untuk menghindari praktik-praktik KKN.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk mengoptimalkan kinerja LPSE Kota Pariaman guna mereduksi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibutuhkan lima strategi memangkas birokrasi untuk pengembangan konsep *reinventing government* (David Osborne dan Peter Plastrik, 2000), yaitu: 1) Strategi inti (*Core Strategy*) Strategi perumusan kembali tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan, melalui penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, serta peran-peran kelembagaan serta individu aparatur penyelenggara pemerintah; 2) Strategi konsekuensi (*Consequency Strategy*) dimana strategi konsekuensi yaitu fokus pada kinerja pegawai. Dalam hal ini aparatur sipil akan berorientasi pada hasil kerja yang menentukan *Key Performance Indicator* (indikator capaian kerja) masing-masing individu. Indikator capaian kerja akan menjadi tolak ukur hasil kerja aparat, yang mana semakin tinggi nilai KPI maka akan semakin memuaskan pelayanan lembaga pemerintah; 3) Strategi pelanggan (*Customer Strategy*). Strategi pelanggan merupakan bagian fundamental yang memusatkan pada akuntabilitas, pertanggung-jawaban lembaga.

LPSE Bertanggungjawab kepada pelanggan/pengguna sebagai pihak ketiga semakin menekan lembaga pemerintah untuk memperbaiki hasil kerja mereka, tidak sekedar mengelola sumber daya mereka saja untuk mengurangi kecurangan. Dalam hal ini, aparat birokrasi melakukan reorientasi dari kepentingan kelembagaannya kepada kepentingan pemenuhan kebutuhan berdasarkan kepentingan masyarakat (*user*), peningkatan kualitas layanan, serta kompetensi pasar yang sehat; 4) Strategi pengendalian

(*Control Strategy*). Strategi Pengendalian, yaitu adanya perumusan kembali dalam upaya pengendalian organisasi, mulai dari : (1) pengendalian strategi yang merupakan proses perumusan dan penetapan sasaran organisasi, (2) pengendalian manajemen, yang merupakan pengendalian dalam menjaga agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, (3) pengendalian tugas sebagai pengendalian yang sifatnya pelaksanaan. Dan ketiga strategi ini bisa dikembangkan dalam struktur organisasi yang bertumpu pada kekuatan aparatur seperti Gugus Kendali Mutu (*Total Quality Control*); 5) Strategi budaya (*Culture Strategy*) yang mana budaya organisasi pemerintah yang dimaksud seperti nilai-nilai, norma, sikap, dan harapan pegawai. Seringkali budaya akan berubah lamban dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Menggunakan tiga pendekatan, yakni: membentuk kebiasaan, perasaan, dan pikiran organisasi kedalam sesuatu yang baru.

Berdasarkan observasi di lapangan terkait 5 strategi yang dijelaskan David Osborne dalam mencari solusi untuk mengoptimalkan layanan LPSE Kota Pariman maka penulis menyimpulkan 4 hal, pertama Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan. Perlu adanya beban kerja untuk memetakan kebutuhan SDM pengadaan di LPSE Kota Pariman. Untuk memaksimalkan kompetensi karyawan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, pelatihan, maupun monitoring. Kedua, pengoptimalan proses pengadaan barang/jasa harus terintegrasi dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. LPSE perlu melengkapi tata kerja dengan standar operasional (SOP), mulai dari aturan dalam Pendampingan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, kemudian pembentukan Pokja Pemilihan, Review Dokumen Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Review Dokumen Pemilihan, Pemilihan Penyedia, serta Penetapan Penyedia LPSE harus memiliki target kinerja yang terukur dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga setiap menyelesaikan tugasnya dilakukan pengukuran kinerja. Ketiga, Sistem Informasi perlu terintegrasi dengan sistem lainnya sesuai kebutuhan, sejak perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Kemudian perlu memaksimalkan penggunaan e-catalog yang mana koordinasi dengan UMKM harus terintegrasi. Upaya yang dilakukan LPSE dengan Dinas UMKM harus sejalan agar potensi distributor lokal dapat digali secara merata. Sehingga tidak ada ketimpangan akibat penggunaan jasa atau barang dari distributor besar saja. Keempat, independen dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Semestinya tidak ada lagi proses konvensional yang dilakukan agar pelaksanaan e-government terwujud khususnya dalam area pelayanan publik. Kegiatan yang masih konvensional, atau masih banyak melakukan tatap muka antara pengguna dengan panitia pengadaan atau pihak pelaksana pengadaan tentunya akan menjadi bias. Oleh karenanya, pemeliharaan alat dan sosialisasi penggunaan aplikasi harus diinformasikan secara terbuka untuk menghindari kegiatan KKN.

2. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

- a. meningkatkan kompetensi pegawainya secara berkelanjutan dalam rangka mendorong kinerja pegawai berupa pendidikan, pelatihan, pengkajian dan pemagangan.
- b. Kemudian, menambah komoditas dan varian dalam katalog sektoral dan lokal selain katalog nasional.
- c. terakhir melakukan peningkatan performa *software* dan *hardware* serta melakukan update versi terbaru sistem informasi pengadaan barang jasa.

E. DAFTAR PUSTAKA

Pustaka berupa buku:

- Anggoro, Renaldi. 2014. Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan barang dan jasa Melalui *e-Procurement* (Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Asrinaldi. 2015. Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju e-Government dan Tantangannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Burhan, N. 1984. Perencanaan Strategis. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Chadwick, Bruce A. 1991. Metode Ilmu Pengetahuan Sosial. IKIP Semarang Press. Semarang, hal. 235.
- Farouk, Muhammad. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. PTIK Press, Jakarta.
- Indrayana, Alifadri. 2014. Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan e-procurement Di Kota Malang Ditinjau Dari Segi Transparansi dan Akuntabilitas. Indonesia Governance Index (IGI), Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014 (34 Kabupaten/Kota di Indonesia).
- Kemitraan dan LPSE Nasional. 2008. E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Jakarta, hal. 46.
- Osborne, David dan Peter Plastrik. 2000. Memangkas Birokrasi. PPM, Cetakan pertama. Jakarta, hal. 45-49.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung.
- Yunita, Novi Prisma. 2018. Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan e-Government Di Indonesia: Analisis Website, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA), Yogyakarta 23-24 Maret 2018.
- Yin, R.K. 2013. Studi Kasus, Desain dan Metode Cetakan ke-12, Penerjemah Mudzakir. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Pustaka berupa majalah/jurnal ilmiah:

- Djuyandi, Yusa. 2013. Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jurnal HUMANIORA Vol. 4 No. 2, Oktober.
- Haryati, Dwi. 2016. Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (e-procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 2.
- Harjito, Yunus. 2015. E-procurement: Peluang dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah. Jurnal Iqtishadia Vol. 8 No. 1.
- Juliarso, Ahmad. 2019. Analisis Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1.
- Mulyono, Purnomo Edy. 2017. Analisis Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik, Airlangga Development Journal.
- Nurlukman, Adie Dwiyanto. 2017. *E-Procurement*: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia, Journal of Government and Civil Society Vol. 1 No. 1.
- Nayabarani, Sabrinah Dyah. 2017. Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 4.
- Putri, Tesha Dwi. 2019. Transparansi dalam Pelaksanaan e-procurement Pada Lembaga

- Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padang. Jurnal Menara Ilmu Vol. 13 No. 11, Oktober. Septiawan, Budi. 2018. Keberhasilan Implementasi Sistem e-Procurement Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat, Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 2 No. 1.
- Rahayu, Triana Puji. 2016. Implementasi Kebijakan e-Procurement untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi, Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2.
- Swadesi, Utari. 2017. Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik *e-Procurement* pada LPSE Kota Pekanbaru, Jurnal Jom FISIP Vol. 4 No.2.